



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia juga mempunyai organisasi masyarakat Islam yang resmi untuk menjaga, mengembangkan, dan memajukan masyarakat Muslim. Salah satu organisasi masyarakat Islam dan memiliki pengaruh signifikan bagi umat muslim di Indonesia adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Kertopaten, Surabaya, Jawa Timur (Soon, 2008, h.1).

Menurut Soon (2008, h.1), NU adalah salah satu organisasi keagamaan Islam yang terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu simbol kekuatan dari struktur komunitas juga spritualitas yang berbasiskan pada tradisi pondok pesantren dan adat setempat.

Jumlah warga NU yang merupakan basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 80 juta orang, yang mayoritas di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi, yang sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa (Khalimi, 2010, h.332).

Tidak adanya catatan resmi yang membahas jumlah warga NU menjadikan jumlah warga NU sangat fleksibel, tergantung siapa yang melihatnya. NU memiliki ajaran-ajaran yang fleksibel, akomodatif, dan membumi di Indonesia (Sobary, 2010, h.107).

Sejak didirikan oleh KH. Mohammad Hasyim Asy'ari, NU juga resmi mengadakan muktamar. Dikutip dari Harian *Kompas* (2015, h.5) muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Muktamar dianggap penting karena membicarakan arah dan kebijakan strategis organisasi, termasuk di antaranya pemilihan pengurus.

Sampai tahun 2010, NU sudah menggelar 32 muktamar. Pada 1-5 Agustus 2015 PBNU mengadakan muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Dalam muktamar ke-33, NU mengangkat tema “*Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*”. Muktamar ke-33 di Jombang akan diikuti oleh sekitar 4.000 peserta resmi.

Namun, muktamar ke-33 terdapat masalah kericuhan karena ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam mekanisme pemilihan rais aam (pimpinan tertinggi yang dianggap sebagai ulama senior). Hal yang dianggap menarik oleh penulis karena selama tiga kali berturut-turut digelar, muktamar 30-32 selalu ada permasalahan atau konflik di dalamnya. Seperti adanya pertarungan sengit antara dua calon ketua umum dan kekecewaan pendukung karena calon kandidat yang menolak pencalonan.

Kali ini kericuhan kembali terjadi di muktamar PBNU ke-33. Penulis tertarik membahas tema ini karena mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim dan PBNU termasuk organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan bahkan dikenal oleh dunia.

Menurut harian *Kompas* (2015, h.1) registrasi peserta muktamar ke-33 sempat ricuh, rapat pleno tata tertib yang seharusnya jadi agenda pertama setelah muktamar dibuka Joko Widodo, Sabtu (1/8) malam, baru dapat dimulai Minggu sekitar pukul 15.00.

Sebelum masuk ke rapat pleno, para muktamirin atau peserta muktamar melakukan registrasi dan wajib menulis nama-nama untuk *Ahlul Halli Wal Aqdi* (AHWA). AHWA terdiri dari ulama atau kiai yang berjumlah sembilan orang, mereka diberi tugas untuk memilih atau dipilih sebagai pucuk pimpinan NU di tingkat PBNU, PWNU (Pengurus Wajib Nahdlatul Ulama) dan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama).

AHWA sudah menjadi perbincangan sejak 2012 dan baru akan diterapkan pada muktamar ke-33. Untuk tingkat PBNU nama-nama AHWA baru ditetapkan dalam muktamar. Setiap PWNU dan PCNU mengusulkan sembilan nama calon AHWA yang selanjutnya akan dihimpun dan dipilih sembilan nama yang menempati peringkat teratas.

Hal inilah yang menyebabkan pemicu kericuhan karena ada kelompok yang mendukung pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem perwakilan AHWA, ada juga yang menolak sistem itu dan menginginkan peserta langsung yang memilih rais aam dan ketua umum PBNU. Penulis menganggap tema ini begitu penting untuk dibahas karena berita tentang kericuhan memberi cerminan buruk bagi PBNU untuk masyarakat Muslim. PBNU yang dianggap sebagai tokoh utama dalam agama Islam seharusnya memberi contoh yang baik bagi umat Muslim.

Sudah sejak awal PBNU memiliki tujuan untuk memajukan, mengembangkan, dan menjaga masyarakat Islam. Namun, adanya masalah kericuhan dan perbedaan pendapat membuat tujuan awal PBNU tidak berjalan dengan semestinya. Munculnya berita tentang PBNU akan mengalami perpecahan karena masalah perbedaan pendapat tentu akan menimbulkan rasa kecewa bagi anggota PBNU dan masyarakat Muslim.

Dikutip dari *Koran Sindo* (2015, h.1) sikap dari NU, menurut Masdar Farid Masudi sebagai Rais Syuriah PBNU, penting karena keberadaannya sebagai ormas terbesar di Indonesia. Lewat forum muktamar, NU ingin memberikan jawaban atas persoalan besar yang dihadapi negara ini. Dari pendapat ini, bisa dikatakan bahwa NU seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang ada, bukan membuat masalah baru.

Penolakan dari muktamirin sudah terjadi sejak registrasi peserta muktamar. Panitia sempat mensyaratkan muktamirin mengusulkan sembilan nama AHWA untuk

dapat memperoleh kartu peserta resmi. Perbedaan ini berlanjut sampai pembahasan tata tertib pasal 14.

Dalam harian *Republika* (2015, h.7) aturan tersebut mengatur tentang pemilihan pimpinan sidang. Sebagian peserta meminta agar pimpinan sidang dipilih langsung dan terbuka oleh muktamirin. Ketika sidang akhirnya terpaksa dibuka pun, muktamirin langsung menghujani pimpinan sidang soal ketersediaan mikrofon yang tidak merata.

Hal kecil pun bisa memicu keributan sehingga pimpinan sidang menskors sidang dan meminta panitia menambah mikrofon. Alhasil, sidang pleno pembahasan tatib di alun-alun Jombang, Jawa Timur, berlangsung dengan adu argumen. Hal ini yang menyebabkan Gus Mus, bersama kiai sepuh NU lainnya terpaksa turun tangan mengatasi kegaduhan muktamar. Kegaduhan saat muktamar yang dilakukan muktamirin seperti tak menghormati wibawa kiai-kiai sepuh tersebut.

Menurut Khalimi (2010, h.335) Nahdlatul Ulama mempunyai sikap (berplatform) moderatisme:

1. *Tawazun* (keseimbangan antara mengejar kepentingan dunia dan kebaahaagian akhirat).
2. *Tawasun* (menghadapi segala sesuatu dengan adil dan mengatur waktu dengan baik).

3. *I'tidal* (tegak membela kebenaran, hindari kebencian, berbuat keadilan, dan bertakwa).
4. *Tasamuh* (mengamalkan sikap toleransi).

NU mempunyai sikap yang lebih mengutamakan persaudaraan daripada memperuncing perbedaan pendapat atau *khilafiah*. Seharusnya, jika lebih mengutamakan persaudaraan, perbedaan pendapat dalam mekanisme pemilihan rais aam tidak terjadi.

Menurut Thomas E O'dea (dikutip dalam Jalaluddin, 2000, h.231) pada dasarnya masyarakat terbentuk dari adanya solidaritas dan konsensus. Solidaritas menjadi dasar terbentuknya organisasi dalam masyarakat, sedangkan konsensus merupakan persetujuan bersama terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan kelompok. Dilihat dari segi agama, hal ini bisa memberi pengaruh dalam menyatukan masyarakat, atau sebaliknya dapat menjadi pemecah, jika solidaritas dan konsensus melemah.

Masyarakat beragama Islam layak berharap pada Ormas, seperti NU, untuk terus berkiprah mengontrol berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (Purwanto, 2010, h.74). Tentunya, sampai detik ini, keputusan NU dalam hal apapun merupakan hal yang mutlak dan sangat memengaruhi khalayak.

Adanya konflik dalam muktamar NU menyebabkan banyak media mengangkatnya sebagai berita utama, seperti harian *Kompas* dan *Republika*. Penulis memilih harian *Kompas* dan *Republika* karena kedua media memiliki perbedaan dalam menulis berita. *Kompas* cenderung bersikap sebagai “jurnalisme keping”. Jurnalisme keping itu seloroh sinis yang dikemukakan Rosihan Anwar tentang *Kompas*. Jakob Oetama, menurut Rosihan, “tidak begitu suka sebutan itu”. Jakob tidak peduli, sebaliknya dia merefleksikan seloroh sinis itu sebagai pilihan cerdas (Sularto, 2015, h.431).

Jurnalisme keping adalah kepribadian *Kompas* yang bergerak ala keping, mencoba langkah satu demi satu untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi kebebasan pers yang ada. Jika aman, kaki keping bisa maju beberapa langkah, jika kondisi tak memungkinkan, kaki keping pun bisa mundur beberapa langkah (Haryanto, 2002, para. 17).

Salah satu kasus yang membuat penulis tertarik dengan jurnalisme keping adalah kasus Arswendo Atmowiloto. Ia adalah seorang sastrawan dan pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi tabloid *Monitor* tahun 1990. Dalam masa pimpinannya di masa lalu, Arswendo pernah melakukan perbuatan yang dinilai melukai umat Islam dengan membuat sebuah survei kontroversial di tabloid *Monitor* edisi 15 Oktober 1990.

Ia mengumumkan hasil survei mengenai siapa tokoh yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia. Hasil dari survei itu adalah menempatkan antara lain Presiden kala itu, Soeharto, di urutan pertama, sedangkan Nabi Muhammad berada di urutan ke sebelas. Hasil tersebut memicu kontroversi dan sejumlah aksi sehingga Arswendo dijerat dengan pasal-pasal KUHP terkait penodaan agama dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara (Wibow, 2010, para.9-11).

Dari kasus tersebut, tabloid *Monitor* di bawah kelompok penerbit *Kompas Gramedia* tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima amarah dari warga yang beragama Muslim, yang merasa agama mereka sudah dilecehkan. Dalam kasus ini muncul sikap jurnalisme kepiting di mana *Kompas Gramedia* selaku penerbit tidak bisa berbuat apa-apa dan mengumpat hingga masalah mulai reda.

Harian *Republika* sendiri dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. *Republika* tidak terlepas dari peran ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang terbit perdana pada 4 Januari 1993. *Republika* banyak berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi. *Republika* mendefinisikan misinya “berbasis komunitas”, dan sangat rajin mengagendakan kepentingan umat Islam (Hamad, 2004, h.122).

Ada perbedaan dalam isi berita di *Harian Kompas* dan *Republika*. *Kompas* yang cenderung umum dan cenderung berhati-hati dalam membuat berita, apalagi membahas tentang pemerintah atau agama, sedangkan *Republika* lebih mendalam membahas tentang berita dan pemerintahan Islam, yang bersangkutan-paut dengan seluruh kegiatan di agama Islam.

Hal ini tentunya menimbulkan dua landasan berpikir yang berbeda dan akhirnya berimbas pada pola pemberitaan yang disajikan. Oleh karena itu, penulis ingin membuktikan apakah *Harian Kompas* dan *Republika* dalam membahas masalah mekanisme pemilihan rais aam di muktamar PBNU ke-33 sudah sesuai dengan karakter media masing-masing.

Tentunya *Harian Kompas* dan *Republika* juga memerhatikan dan memasukkan nilai berita dalam membuat suatu berita. Diambil dari dua buku, yaitu *Jurnalistik : Petunjuk Teknis Menulis Berita* dari Sedia Willing Barus dan *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* dari Luwi Ishwara, berita ricuhnya muktamar PBNU ke-33 memiliki nilai berita, yaitu:

1. Konflik: Berita mengenai konflik memang menarik untuk dibahas dan tentunya memiliki nilai jual tinggi karena akan memengaruhi kehidupan banyak orang. Apalagi konflik yang terjadi di dalam ormas Islam, di mana Indonesia termasuk negara dengan penduduk paling banyak beragama Islam.

Tentunya akan banyak mendapat perhatian lebih untuk mengikuti alur cerita dari awal hingga akhir.

2. *Proximity*: Kedekatan adalah ukuran yang diterapkan pada berita untuk menentukan apakah layak dihimpun atau di mana bisa dijual (Ishwara, 2007, h.55). Peristiwa ricuhnya muktamar ke-33 juga terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam. Tentunya, bagi para umat muslim, akan ada ketertarikan perasaan dan kedekatan yang bisa saja terjadi ketika mendengar berita muktamar PBNU ke-33. Menurut Barus (2010, h.33) faktor jauh dekatnya jarak antara tempat terjadinya peristiwa dengan penikmat berita memengaruhi daya tarik atau nilai sebuah berita.

Dalam kasus ricuhnya PBNU, digunakan analisis *framing* atau analisis bingkai untuk mengkaji isi teks media. Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Peneliti menggunakan analisis *framing* karena paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi (Eriyanto, 2002, h.43).

Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, tetapi juga subjek yang menkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Harian *Kompas* dan *Republika* memilih realitas mana yang diambil dan tidak diambil. Dalam peristiwa muktamar PBNU ke-33, peristiwa yang diberitakan paling banyak mengenai ricuhnya muktamirin terhadap tidak setujunya menggunakan sistem AHWA dalam memilih rais aam.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana media cetak *Kompas* dan *Republika* membingkai isu tentang masalah yang terjadi dalam muktamar PBNU ke-33?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis ingin mengetahui bagaimana *Kompas* dan *Republika* membingkai peristiwa tentang masalah muktamar PBNU ke-33 dalam media cetak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini bisa memperkaya dan menambah kajian mengenai pembingkaiian suatu berita di media massa dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik yang tertarik dengan penelitian analisis teks media khususnya yang menggunakan analisis *framing* model Robert M. Entman.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian komunikasi tentang bagaimana media dapat mengkonstruksi sebuah isu berdasarkan pandangan masing-masing setiap media. Diharapkan penelitian ini juga memberi pengetahuan khazanah tentang Nahdlatul Ulama dalam media cetak di Indonesia.

Hal ini bisa memberi pengetahuan yang lebih untuk peneliti selanjutnya dan khalayak mengenai pembingkaiian sebuah isu dalam setiap media. Adanya pembahasan konflik yang terjadi dalam Nahdlatul Ulama dengan menggunakan studi

analisis Robert M. Entman bisa mengetahui penyelesaian apa yang disarankan oleh media.

Secara praktis, penelitian ini juga dapat dijadikan sebuah landasan untuk memahami tentang bagaimana suatu media massa di Indonesia khususnya Harian *Kompas* dan *Republika* dalam membingkai isu tentang masalah mekanisme pemilihan rais aam di muktamar PBNU ke-33 dengan karakter media masing-masing.

Bagi Harian *Kompas* dan *Republika*, sekiranya penelitian ini berguna sebagai gambaran bagaimana kedua media memposisikan diri dalam menulis sebuah peristiwa tentang ricuhnya sebuah ormas besar.

Diharapkan penelitian ini juga memberikan gambaran pada praktisi media untuk memilih *framing* pemberitaan yang tepat dengan isu yang sedang marak untuk dibahas.

